

BERBAGI PENGETAHUAN DENGAN KELOMPOK PEMUDA TANJUNG DAPURA DALAM MEWASPADAI TURBULENSI POLITIK

SHARING KNOWLEDGE WITH TANJUNG DAPURA YOUTH GROUP IN AWARE OF POLITICAL TURBULENCE

Emanuel Omedetho Jermias¹, Abdul Rahman^{1*}, Nurlela¹, Mubarak Dahlan¹

¹Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

*Email korespondensi: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Abstract

Indonesia, which has chosen the path of becoming a democratic country, should no longer question differences in choices in general elections. However, in the course of history, general elections, especially in 2014 and 2019, were marked by divisions in society. This has also become a concern for some groups that a similar incident will occur so that there will be political turbulence in society. On that basis, this service activity is carried out by making youth partners, so that youth can respond wisely to various events related to the 2024 election. This activity is carried out on Jalan Tanjung Dapura by holding discussions with partner groups. The results of the dedication show that young people with the status of first-time voters are very enthusiastic about this activity. They will also participate actively in the 2024 elections democratically. They hope that the elections can take place peacefully, there will be no divisions in society for the sake of the integrity of the nation and state.

Keywords: *Election 2024, Youth, Political Turbulence*

Abstrak

Indonesia yang memilih jalan sebagai Negara Demokrasi seharusnya sudah tidak lagi mempersoalkan perbedaan pilihan dalam pemilihan umum. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah, pemilihan umum, terutama pada tahun 2014 dan 2019 diwarnai dengan keterbelahan di masyarakat. Hal ini pun menjadi kekhawatiran sebagian kalangan akan munculnya peristiwa serupa sehingga akan terjadi turbulensi politik dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, maka kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menjadikan pemuda sebagai mitra, agar para pemuda dapat menyikapi dengan bijak berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Tanjung Dapura dengan cara melakukan diskusi dengan kelompok mitra. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa para pemuda yang berstatus sebagai pemilih pemula sangat antusias terhadap kegiatan ini. Mereka pun akan berpartisipasi aktif pada pemilu 2024 secara demokratis. Mereka berharap agar pemilu dapat berlangsung secara damai, tidak terjadi perpecahan di lingkungan masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara.

Kata kunci: *Pemilu 2024, Pemuda, Turbulensi Politik*



Copyright © 2023 **Emanuel Omedetho Jermias, Abdul Rahman, Nurlela, Mubarak Dahlan**

PENDAHULUAN

Indonesia yang bercorak negara demokrasi senantiasa berupaya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan meletakkan kedaulatan rakyat berposisi pada tingkat paling tinggi. Jargon demokrasi yang diperkenalkan oleh Abraham Lincoln yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi sesuatu patokan tidak bergeser dalam kehidupan demokrasi. Pemilihan kepala pemerintahan/kepala negara dan wakil rakyat yang akan menjalankan misi perwujudan kemakmuran rakyat sangat jelas tidak dapat terpisah dari konsep pengembalian kedaulatan pada rakyat. Legalitas sebagai pejuang rakyat dalam lembaga eksekutif maupun legislatif menjadi pilihan utama agar proses perwujudan kemakmuran tersebut mempunyai legalitas pasti secara hukum dan dapat memperoleh pengakuan dalam pergaulan antara bangsa. Aktivitas utama dalam konteks pelegitimasi amanat memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat didefinisikan dalam sebuah nama yaitu pemilu. Pemilu yang didefinisikan sebagai sebuah kegiatan praktis/implementasi dari tindakan memilih para pejuang dan pengembalian amanat rakyat menjadi pilar terdepan dalam menegakkan demokrasi yang berorientasi kerakyatan. Berbagai opini yang dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk aksi nyata akan dilaksanakan dan diusahakan melalui tata cara yang pada hakikatnya juga dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh DPR sebagai lembaga wakil rakyat. Tampak jelas keterhubungan antara pemilu dan lembaga wakil rakyat merupakan sebuah keterhubungan formal yang telah dihasilkan melalui proses pergumulan demokrasi (Roziqi, 2009).

Rakyat Indonesia kini bersiap menyongsong perhelatan akbar demokrasi secara serentak pada tahun 2024. Pada tahun itu akan ada dua perhelatan pemilihan untuk memilih calon pimpinan mulai dari tingkat pusat hingga daerah yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu dihelat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu Pilkada dihelat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.

Pemilu 2024 merupakan pemilu keenam sejak era reformasi. Jutaan rakyat Indonesia akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan politiknya. Prosesi formal Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 ketika disusun perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Hampir semua kalangan, khususnya para Ilmuwan Politik menyepakati bahwa pemilu merupakan salah satu standar utama dalam mengukur iklim demokrasi sebuah sistem politik. Pada umumnya tidak ada sistem politik yang bersedia menerima pelabelan sebagai sistem yang tidak demokratis, olehnya itu agak sukar dijumpai sistem politik yang tidak menyelenggarakan Pemilu, kecuali sejumlah kecil saja misalnya Brunei Darussalam dan sejumlah negara monarki di Kawasan Asia Barat Daya. Bahkan negara-negara bekas penganut paham komunis pun melaksanakan pemilu, meskipun hanya sebagai formalitas politik belaka.

Sebagai formalitas politik, pemilu hanya ditempatkan sebagai alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilu sendiri dijalankan tanpa proses demokratis. Kemenangan satu partai peserta pemilu lebih merupakan hasil manipulasi dari pemegang kekuasaan daripada hasil pilihan politik rakyat. Partai yang meraih suara terbanyak acap kali telah diketahui sebelum pemilu sendiri dilaksanakan. Sebaliknya, sebagai alat demokrasi, pemilu diselenggarakan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil (Fatah, 2000).

Sebagai negara demokrasi, proses menuju pemilu di Indonesia memiliki dinamika yang khas. Pemilu di Indonesia tidak bisa dipungkiri juga sebagai arena pertarungan di tingkat elite yang melibatkan aktor-aktor yang sudah lama malang melintang dalam percaturan politik nasional. Saat ini, pertarungan di pesta pemilihan umum dan pilpres 2024 terus menghangat. Sejumlah partai politik telah bergantian mengumumkan bakal calon presiden pilihan mereka ke hadapan publik. Partai Nasional Demokrat telah resmi menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, sementara Partai Gerakan Indonesia Raya bakal mengusung Prabowo Subianto.

Pasca pengusungan tersebut, suhu politik Indonesia mulai menghangat. Perdebatan-perdebatan yang terkadang bernuansa saling menghina dan mencaci, terutama di jagad maya mulai bermunculan. Makanya hal yang tidak mengherankan jika Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono suhu politik akan memanaskan pada tahun 2024. Gejalanya, sudah mulai dirasakan saat ini. Atas dasar itu, institusi Polri meminta kepada pejabat kepala daerah berperan aktif dalam mewaspadai potensi kekacauan yang timbul dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Saat ini keterbelahan di lingkungan masyarakat cukup tinggi. Terlebih, polisi masih menjumpai banyak keterbelahan sosial atas dasar politik identitas. Hal ini bisa menjadi penyebab perpecahan anak bangsa jika dibiarkan dan kalau kita tidak dapat mengelolanya secara tepat. Belajar dari pengalaman, potensi kerawanan sosial itu bermula dari kampanye hitam, politik identitas, cacik maki kebencian, hingga berita-berita hoaks yang tersebar sepanjang pelaksanaan Pemilu, dan hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menilai wajar jika iklim politik menghangat menjelang perhelatan demokrasi, seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar masyarakat tidak gampang terhanyutkan oleh aruse kepentingan politik yang tidak berfaedah bagi kelangsungan bangsa. Atas dasar itu, Jokowi meminta jajaran menteri terkait di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, dan Mendagri Tito Karnavian untuk melaksanakan penbelajaran dan sosialisasi politik secara tersistem kepada masyarakat agar tidak gampang diprovokasi. Jokowi juga menghimbau kepada partai politik maupun pihak-pihak yang akan berlaga pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak menyebarkan isu-isu politik identitas, karena Indonesia mempunyai pengalaman buruk pada pesta demokrasi sebelumnya.

Menghangatnya suhu politik menjelang pemilu 2024 bahkan dinilai oleh beberapa kalangan akan memunculkan turbulensi politik. Dalam pandangan Sirajuddin Abdul Wahab, salah satu kampiun pendukung Anies Baswedan menilai bahwa saat ini ini di tahun 2023 memang menjadi tahun yang krusial bagi arena politik nasional. Hal ini dikarenakan proses kandidasi oleh partai politik pengusung

pasangan calon presiden. Partai politik dalam mengusung calon presiden belum bisa terbebas dari proses transaksi politik dan kekuasaan (Wardhani, 2019). Keputusan partai politik masih dibawah pengaruh kuat kalangan pemilik modal, elite partai politik yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dibandingkan dengan kepentingan nasional (Nuna & Moonti, 2019).

Turbulensi politik yang dikhawatirkan bakal terjadi dalam menyongsong pemilu 2024 tidak merembet pada kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. Sebab kalau hal itu terjadi maka sangat besar resikonya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan. Kita tidak menghendaki adanya konflik terbuka di antara sesama masyarakat hanya karena perbedaan pilihan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya di kalangan para pemuda sebagai pemilik suara terbesar pada pemilu 2024.

Upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu pula dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, dalam hal ini para dosen sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menjadikan pemuda yang bermukim di Tanjung Dapura sebagai mitra. Kegiatan ini sengaja menjadikan pemuda sebagai kelompok mitra karena mereka yang aktif menggunakan media sosial, dan diharapkan dengan melalui media sosial pula mereka mengkampanyekan agar tetap menjaga kondisi kemasyarakatan yang harmonis meskipun saat ini Indonesia telah berada pada tahun politik dalam menyongsong perhelatan demokrasi, pemilihan umum 2024.

METODE

Kegiatan berbagi pengetahuan yang menempatkan pemuda Tanjung Dapura sebagai mitra sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penyuluhan. Penyuluhan merupakan pengarusutamaan pendidikan yang sifatnya non formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilaksanakan secara tersistem, terencana, dan terarah dalam usaha merubah pola pikir secara berkelanjutan. Penyuluhan merupakan usaha pembaharuan tingkah laku manusia yang dilaksanakan melalui pendekatan edukatif (Rohanah &

Sayyidah, 2022). Pendekatan edukatif didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dengan partisipasi aktif individu, kelompok atau masyarakat dalam mencari solusi sebuah problematik dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek politik dan sosiokultural masyarakat. Penyuluhan diartikan pula sebagai upaya menyebarluaskan gagasan-gagasan kekinian dan aktual guna menarik perhatian masyarakat agar mereka berminat dan bersedia menerapkannya dalam aktivitas keseharian mereka (Rohman & Nugraha, 2022). Penyuluhan selalu bersangkut paut dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat mengikuti materi penyuluhan dengan baik, sehingga harapannya ada kesadaran dalam diri mereka untuk menerapkan ide-ide tersebut. Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu bermula pada tahapan persiapan yang meliputi antara lain:

1. Observasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi mitra pengabdian di Jalan Tanjung Dapura, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk mengetahui keadaan mitra dalam proses pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengabdian dari Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Observasi dilakukan tiga kali yaitu dua kali untuk persiapan penulisan proposal sebagai bahan untuk memperoleh penugasan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makassar, dan satu kali untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
2. Wawancara, dilakukan terhadap pemuda untuk memperoleh gambaran awal akan pengetahuan mereka mengenai kondisi perpolitikan nasional menjelang pemilihan umum 2024.
3. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari teori, konsep, dan fenomena atau kasus yang berkaitan dengan peristiwa politik tanah air menjelang pemilihan umum 2024.
4. Koordinasi. Koordinasi internal dengan tim pengabdian dari Universitas

Negeri Makassar, membahas dan mempersiapkan materi dan mendiskusikan pendekatan yang akan diterapkan dalam penyuluhan. Dalam tahap ini pula dibahas mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan. Sementara koordinasi eksternal dilakukan dengan kelompok pemuda Tanjung Dapura sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.

Setelah tahapan persiapan dirasa matang, maka tibalah pada tahapan pelaksanaan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian materi. Karena mitra dalam pengabdian ini adalah rata-rata pemuda yang berstatus sebagai siswa SMA sekaligus sebagai calon pemilih pada pemilu 2024, maka penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dengan menampilkan beberapa *slide PPT*.
2. Diskusi. Kegiatan ini dilakukan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan pemilu 2024. Tema-tema diskusi berkaitan dengan pencalonan capres yang identik dengan kepentingan oligarki, isu politik identitas, keterbelahan masyarakat karena perbedaan dukungan, sampai pada isu nasib IKN pasca pemilihan umum.
3. Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran akan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan oleh tim, agar dapat dilakukan perbaikan jika ada kekurangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi Muda sebagai pelanjut cita-cita bangsa seharusnya memiliki sikap, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang baik dan memadai (Sahlan, Nurdin, & Wardah, 2023), termasuk dalam hal pengetahuan politik. Atas dasar itu, maka tim pengabdian dari Universitas Negeri Makassar melakukan kegiatan pengabdian dengan menempatkan pemuda sebagai mitra kegiatan. Pada hari Jumat 19 Mei 2023 telah diadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan pemuda Tanjung Dapura sebagai mitra pengabdian. Pengabdian dilaksanakan di salah

satu rumah mitra atas persetujuan orangtua yang bersangkutan. Kegiatan dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 07.30-22 WITA. Kegiatan dilaksanakan pada malam hari berdasarkan pertimbangan dari para peserta, karena pada siang harinya ada yang beraktivitas memberikan pelayanan di Gereja. Materi disampaikan oleh salah satu tim pengabdian, namun pada saat diskusi semua tim terlibat dalam berbagi pengetahuan dengan para peserta. Peserta kegiatan berjumlah 23 orang, semuanya berstatus sebagai pemilih pemula pada pemilihan umum 2024.



Gambar 1. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini mendapat perhatian dari para peserta. Mereka menganggap bahwa materi ini sebagai salah satu referensi bagi mereka dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024. Secara garis besarnya, sikap mereka terhadap materi yang disampaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tanggapan peserta

Isu	Setuju	Tidak Setuju
Pemilu Penting	23	0
Ikut Pemilu	23	0
Politik Identitas	0	23
Keutuhan Bangsa	23	0
Golput	0	23
Cebong-Kadrun	0	23

Berdasarkan tabel di atas maka ini menjadi harapan bagi perjalanan demokrasi ke depan. Pemuda sebagai pemilih mayoritas pada pemilu 2024 memiliki pemahaman politik bahwa pemilu itu penting dilaksanakan dengan tetap menjaga ketuhanan bangsa dan negara dengan cara menghindari politik identitas, terutama atas nama agama. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini ialah:

Peran Pemuda Dalam Pemilu 2024

Pemuda sebagai pemilih milenial harus tampil sebagai kelompok tercerahkan sehingga tidak sekadar menjadi tim penggembira dalam konstelasi perpolitikan nasional, tetapi juga menjadi subjek atau aktor yang kritis, dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan pengambilan keputusan politik yang demokratis dan menyadari akan hak dan tanggungjawab dengan baik dan benar.

Ketika budaya politik milenial dipersentuhkan dengan arus kepentingan politik pragmatis oleh para elite politik menuju momentum pemilu 2024. Keterbukaan informasi sebagai penanda utama budaya politik pemilih milenial masih dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat kepentingan "kemenangan partai" oleh sebagian kalangan. Pemilu yang seharusnya menjadi arena dalam menawarkan rencana kerja dan kebulatan tekad mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara justru dipenuhi oleh intrik-intrik dan kelancangan politik demi mencapai dan mempertahankan legitimasi kuasa. Akan tetapi, pada generasi ini pula acapkali dipersepsikan mengabaikan kondisi politik, terutama ketika pesta demokrasi. Sehingga perlu disadari oleh para pemilih milenial yang acapkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak memiliki kepedulian dengan hal ikhwil perpolitikan. Untuk dapat mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, peduli terhadap informasi yang tepat mengenai politik dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran, keterlibatan dan partisipasi politik pada pemilih milenial. Mengingat bahwa kelompok pemilih milenial ini yang selalu diperhitungkan pada setiap masa, yang acapkali diposisikan sebagai objek daripada subjek politik sehingga sangat memungkinkan munculnya pemilih milenial yang tidak peduli terhadap dunia politik. Namun, dengan kesadaran akan politik pada pemilih milenial mampu membawa politik bangsa ke arah yang lebih baik (<https://staisyekhjangkung.ac.id/2022/10/pemilih-milenial-apolis-terhadap-demokrasi-benarkah/>).

Mewaspada Politik Identitas

Politik identitas merupakan hal yang memunculkan keterbelahan sosial antar masyarakat, hal tersebut pernah ramai terjadi pada pemilu 2014, 2019 dan juga terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

Jakarta. Tampak jelas di lapangan bagaimana perilaku pendukung Anies Baswedan yang menolak untuk mengurus jenazah sesama kaum Muslim hanya karena mendukung Basuki Tjahaya Purnama. Politik Identitas ini berujung pada hubungan antar warga menjadi renggang hanya karena berbeda dalam pilihan politik. Sebelumnya sudah pernah terjadi di mana masjid dijadikan sebagai tempat kampanye, tentu saja hal tersebut tidak boleh terjadi kembali, karena jika hal tersebut dibiarkan, bukan hanya di masyarakat saja keterbelahan sosial bisa terjadi, tetapi juga di dalam masjid dan pesantren. Jangan sampai hanya gara-gara berbeda dalam pilihan politik justru menjadikan seseorang dilarang masuk masjid

(<https://radarsampit.jawapos.com/nasional/14/05/2023/waspada-politik-identitas-jelang-pemilu-2024/>).

Politik identitas acapkali menjadi topik yang ramai diulas menjelang Pemilu, hal ini disebabkan politik identitas sangat rawan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar itu, dibutuhkan peran aktif generasi muda untuk bergerak serentak menghalangi dan menghalau Politik Identitas pada Pemilu 2024 demi menampilkan pesta demokrasi yang penuh dengan keharmonisan. Menjadikan agama sebagai alat politik tentu saja merupakan sesuatu yang membahayakan hubungan antar umat beragama, sehingga diharapkan Pemilu 2024 di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 14 Februari dapat berlangsung secara demokratis dan rasional (Fikri, 2023).

Jaga Keutuhan Bangsa

Keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Umum 2024 bukan sekadar dibebankan kepada penyelenggara ataupun peserta pemilu, tetapi diperlukan pula peran aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku netralitas aparat penegak hukum sangat diperlukan pula demi terselenggaranya pemilu yang damai (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/25/pererat-kebersamaan-untuk-pastikan-pemilu-damai>).

Pemilu sebagai arena dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menciptakan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dan dalam setiap momentum pemilu, rakyat dalam hal ini adalah

pemuda, wajib berperan aktif sebagai aktor yang mengawasi proses pemilu. Sehingga pemilu dapat terselenggara berdasarkan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Faqihuddin, 2022).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada salah satu rumah warga di Jalan Tanjung Dapura sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi diikuti secara antusias oleh para peserta. Secara umum mereka menyadari akan pentingnya pemilihan umum sebagai arena untuk menentukan perjalanan bangsa ke depan. Pemilu bagi mereka merupakan hal yang penting, namun pelaksanaannya harus memperhatikan keutuhan bangsa dengan menghindari politik identitas yang sudah terbukti keburukannya pada pemilu 2014 dan 2019 serta pilkada DKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Faqihuddin, F. (2022). *Peran Pemuda Pada Pemilu 2024*. Cilacap: Netfid. Retrieved from <https://kelas pemilu.org/peran-pemuda-pada-pemilu-2024>
- Fatah, E. S. (2000). *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Fikri, A. (2023). Generasi Muda Berperan Aktif Tolak Politik Identitas pada Pemilu 2024. *Radar Sampit*. Retrieved from <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/17/01/2023/generasi-muda-berperan-aktif-tolak-politik-identitas-pada-pemilu-2024/>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.
- Rohanah, R., & Sayyidah, S. (2022). The Community Service Education About Reproductive Health In Youth: Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Mengenai Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Terkini*, 1(1), 35–40.

Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2022). Mengeksplorasi Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Menyusun Naskah Materi Penyuluhan Nilai-Nilai Moderasi Beragama. *Harmoni*, 21(2), 300–315.

Roziqi, M. (2009). Pemilu Formalitas. *Komunikasi*. Retrieved from <http://komunikasi.um.ac.id/2009/05/pemilu-formalitas/>

Sahlan, S., Nurdin, N., & Wardah, S. (2023). PERAN PEMUDA DALAM PENGUATAN MANAJEMEN USAHA TANI MELALUI INTEGRASI KEARIFAN LOKAL: The Role Of Youth In Strengthening Farming Business Management Through The Integration Of Local Wisdom. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v2i1.28>

Wardhani, L. C. (2019). Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).